



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
UNIT KERJA : DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ACHMAD SOEBEKTI
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 724833

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.800.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 456 m2/140 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, WARISAN Rp. 1.500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 182 m2/100 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, WARISAN Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 98.500.000

1. MOBIL, DAIHATSU MINI BUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO SPM Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
3. MOTOR, HONDA BEBEK SPM Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
4. MOTOR, HONDA TIGER SPM Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 85.451.572

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.983.951.572

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.983.951.572

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.